



LURAH KALIREJO

KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN KALIREJO

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kalurahan tentang Laporan  
Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 15 Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
28. Surat dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.2.3/6149/BPD perihal Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;
29. Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
30. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
31. Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
34. Peraturan Gubernur DIY Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dan Keistimewaan Kepada Kalurahan;
35. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah

Kalurahan;

36. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan;
37. Berita Acara Bantuan Keuangan Khusus Dana Kesitimewaan Balai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kalurahan Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo tahun Anggaran 2023 Nomor 918/18051 tanggal 25 November 2022;
38. Berita Acara Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Desa Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kaluraha Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023 Nomor 918/18046 tanggal 25 November 2022 ;
39. Berita Acara Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Tata Kelola Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kaluraha Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023 Nomor 918/18063 tanggal 25 November 2022;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawatan Desa;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
48. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
49. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
50. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
51. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
52. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 424/A/2019 tentang Besaran Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Honorarium Unsur Pembantu Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
53. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 343/B/2019 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;
54. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 337/C/2022 Tentang Besaran Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan, dan Tim Pelaksana Kegiatan di Kalurahan;
55. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Kalirejo;
56. Peraturan Kalurahan Kalirejo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal) Tahun Anggaran 2023.

**Dengan Kesepakatan Bersama**

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALIREJO

dan

LURAH KALIREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KALIREJO TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 setelah  
perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan		4.964.569.169,00
2.	Belanja Kalurahan		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp.	1.228.207.236,00
b.	Bidang Pembangunan Kalurahan	Rp.	2.725.032.836,50
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp.	401.935.559,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp.	289.434.417,00
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp.	183.400.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.	<b>4.828.010.048,50</b>
	Surplus / (Deficit)	Rp.	136.559.120,50
3.	Pembiayaan Kalurahan		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	113.440.879,50
b.	Pengeluaran Desa	Rp.	250.000.000,00
	Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	(136.559.120,50)

Pasal 2

Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan		4.887.307.866,50
2.	Belanja Kalurahan		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp.	1.182.614.521,00
b.	Bidang Pembangunan Kalurahan	Rp.	2.605.992.744,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp.	375.494.200,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp.	190.286.925,00
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp.	166.300.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.	4.520.688.390,00
	Surplus/Defisit	Rp.	366.619.476,50
3.	Pembiayaan Kalurahan		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	113.440.879,50
b.	Pengeluaran Desa	Rp.	250.000.000,00
	Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	(136.559.120,50)

<b>SILPA Tahun 2023</b>	<b>Rp.</b>	<b><u>230.060.356,00</u></b>
-------------------------	------------	------------------------------

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2023; dan
3. Lampiran III : Laporan Program Sektor dan Program Daerah yang masuk ke desa.



Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan oleh Carik.



Ditetapkan di Kalirejo

pada tanggal Januari 2024

LURAH KALIREJO

Cap/ttd

**L A N A**

Diundangkan di Kalirejo

pada tanggal Januari 2024

CARIK

Cap/ttd

**SUKARDI**

LEMBARAN KALURAHAN KALIREJO TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN III

PERATURAN KALURAHAN NOMOR 1  
TAHUN 2024 TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

Kalurahan : Kalirejo

Kapanewon : Kokap

Kabupaten : Kulon Progo

No	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber dana
1.	Pembangunan Rumah Layak Huni	RTLH	Plampang 2	1	Unit	10.000.000,-	BKAD Semar
2.	Pembangunan Rumah Layak Huni	RTLH	Plampang 1	1	Unit	20.000.000,-	BAZNAS

3.	Pembangunan Rumah Layak Huni	RTLH	Plampang 1	1	Unit	7.500.000,-	BAZNAS
4.	Kebudayaan	Gelar potensi	Kalirejo	1	Kegiatan	22.811.000,-	Dinas Kebudayaan DIY
5.	Kebudayaan	Fasilitasi Upacara Adat	Kalirejo	1	Kegiatan	27.051.000,-	Dinas Kebudayaan DIY
6.	Kebudayaan	Sloso Wagen	Kalirejo	1	Kegiatan	17.315.000,-	Dinas Kebudayaan DIY
7.	TMMD Sengkuyung	Cor Blok Jalan	Plampang I	1	Kegiatan	245.000.000,-	APBD I APBD II
8.	Padat Karya	Rabat Beton	Plampang II Rt 64/20	140	M	100.000.000,-	Nakertrans Kabupaten KP
9.	Padat Karya	Rabat Beton	Sangon I	151	M	100.000.000,-	Nakertrans DIY
10.	Lampu Penerangan Jalan	LPJ	Sangon I	13	Titik	50.000.000,-	Nakertrans DIY
11.	Kampung Siaga Bencana	KSB Si Bejo	Kalirejo	1	Paket	151.595.780	Dinsos DIY
12.	Penanggulangan Kekeringan	Droping Air Bersih	Kalirejo	232	Tangki		BPBD Kabupaten
13.	Penanggulangan Kekeringan	Droping Air Bersih	Kalirejo	135	Tangki	47.250.000,-	PIBEPI
14.	Penyuluhan Pertolongan Pertama pada Penderes	Kecelakaan Penderes	Kalirejo	1	Paket		UGM
15.	Bantuan Logistik Makanan	Penanganan Bencana	Kalirejo	8	Paket		BPBD KP
16.	Terpal Penampung air	Penanganan Kekeringan	Kalirejo	12	Buah		BPBD KP

17.	Kawat Bronjong	Penangann Bencana	Kalirejo		Buah		BPBD KP
18.	Pengaman Jalan H. Tirta Kalirejo	Goudril	Kalibuko I	20	M		Dinas PU Kabupaten KP
19.	Pembangunan Sumur Bor	Sumur Bor	Kalibuko I	1	Unit		PUPESDM DIY
20.	Bantuan Lanjut usia	JSLU	Kalirejo	25	Org	15.000.000	DINSOS DIY

Kalirejo, 12 Januari 2024

**LURAH KALIREJO**

Cap/ttd

**L A N A**